



## DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ALASA

Dermawan Natal Krisman Hulu<sup>1)</sup>, Syukur Kasieli Hulu<sup>2)</sup>, Amstrong Harefa<sup>3)</sup>,  
Hendrikus Otniel N. Harefa<sup>4)</sup>

Universitas Nias

Email: [dermawannatakrismanhulu@gmail.com](mailto:dermawannatakrismanhulu@gmail.com)<sup>1)</sup>, [syukur.hulu@gmail.com](mailto:syukur.hulu@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[amstrong.harefa@gmail.com](mailto:amstrong.harefa@gmail.com)<sup>3)</sup>, [hendrikus.harefa@gmail.com](mailto:hendrikus.harefa@gmail.com)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan di Kecamatan Alasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dengan beberapa informan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: *Pertama* Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah belum 100% terlaksana. Hal ini terjadi karena masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan. *Kedua* Kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada di kecamatan alasa sehingga dapat menyulitkan dan menghambat pelaksanaan program. *Ketiga* Upaya mengatasi kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu Camat dan pemerintahan Kecamatan bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hambatan, selalu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Dampak, Kebijakan Publik, Kemiskinan

### Abstract

*This study aims to determine the impact of public policies in the mitigation program in Alasa Sub-district. This research uses a descriptive approach with qualitative methods, to obtain primary data and secondary data where data collection is carried out by means of observation, interviews, documentation, with several informants. This research was conducted in Alasa Sub-district, North Nias Regency. Based on the results of the research, it is concluded that: First, the Impact of Public Policy in the Poverty Reduction Program in Alasa District is not 100% implemented. This happens because there are still many governments who abuse aid or long-term dependence on aid. Second The constraints of Public Policy in the Poverty Reduction Program in Alasa Subdistrict are the limited budget and facilities in the Alasa sub-district so that it can complicate and hinder the implementation of the program. Third Efforts to overcome obstacles to Public Policy in the Poverty Reduction Program in Alasa Subdistrict are the sub-district head and the sub-district government cooperating with the district government so that the public policies provided run smoothly and avoid obstacles, always collecting and analyzing accurate and up-to-date data to facilitate more effective program planning and evaluation.*

**Keywords:** Impact, Public Policy, Poverty



## **I. PENDAHULUAN**

Menurut Chandler dan Plano (2017) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan publik kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut.

(Dye, 2017) kebijakan publik adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Budi Winarno (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang

mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan publik dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah system yang terdiri dari input, proses dan output.

Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijaksanaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen.



Kebijakan publik dapat diartikan sebagai: 1) Tindakan yang bertujuan, 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menunjuk kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri, 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang, 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu. Konsep kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dengan hakikat dari konsep kebijakan. Secara leksikal, konsep kebijakan atau polisi disarikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. (Leo Agustino, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diatur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Begitu pula persoalan kemiskinan masih menjadi “pekerjaan rumah” yang belum kunjung berakhir bagi pemerintah Indonesia. Tentu saja persoalan kemiskinan berimbas ke berbagai daerah.

(Suryawati, 2015) Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain



seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Selain itu kemiskinan juga disebabkan karena banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akan akses terhadap pelayanan dasar seperti keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga BBM, tarif dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang dihadapinya. oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat berperan sebagai bagian utama dari berbagai strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentang bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dipandang perlu untuk diberdayakan.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program peningkatan nasional (PROPENAS), pemerintah menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut sebesar 4 persen dari tingkat kemiskinan pada tahun 1999. Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam pembangunan nasional berencana delapan tahun. Namun program tersebut terhenti ditengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Alasa pada tanggal 06 Mei 2024 dan melakukan wawancara kepada camat, masih terdapat kemiskinan karena kelalaian dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah di Kecamatan Alasa. kurangnya peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatnya tingkat pengangguran, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji judul **“Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa.”**



## II. METODE PENELITIAN

Menurut (Moleong 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut (Arikunto, 2019) “pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkapbaik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, (Rukminingsih, Adnan, and Latief 2020).

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai suatu hal menuturkan (tindakan, keberadaan dan pengalaman) pandangan manusia yang diteliti. Peneliti kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka, (Rukminingsih, Adnan, and Latief 2020).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti adalah mengungkap fenomena dan menghayati masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini data diperoleh lebih lengkap untuk tercapainya tujuan dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa perantara. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dilapangan, melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik dengan memanfaatkan handphone untuk merekam suara serta mengambil gambar. Menurut Moleong (2017) “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat



ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Alasa merupakan salah satu Daerah di Kabupaten Nias Utara yang mempunyai luas sekitar 204,37 km<sup>2</sup>. Desa terluas di Kecamatan Alasa adalah desa Dahana Tugala Oyo yang mempunyai luas sekitar 18,66 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,13% dari luas Kecamatan Alasa. Desa terkecil adalah desa Banuasibohou I dengan luas sekitar 5,06 km<sup>2</sup>. Kecamatan Alasa berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Lahewa Timur, sebelah selatan Kecamatan Tugala Oyo, sebelah timur Kecamatan Alasa Takumuzoi, sebelah barat Kecamatan Afulu. (*Kecamatan Alasa*)

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada Camat, Tokoh Masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yostinus Hulu, S.Pd., selaku Camat, Masarudi Hulu selaku kepala Dusun di desa Banuasibohou I, Finisari Daeli, S.Pd selaku kepala sekolah di SMP Negeri 7 Alasa, Junisman Hulu selaku ketua karang taruna di Desa Hiligawoni di Kecamatan Alasa.

#### 1. Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Alasa

Bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu sebuah kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Dalam Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, dan sebagainya, Program ini merupakan kebijakan dari pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat.

Sejauh ini dampak kebijaka publik dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa belum 100% terlaksana, karena masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan. Dan juga sebagian masyarakat Kecamatan Alasa





mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Beberapa faktor penyalahgunaan bantuan Dan masyarakat yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa dalam hal penanggulangan kemiskinan.

(*kecamatan alasa*) antara lain:

- a. Faktor penyebab penyalahgunaan bantuan dari pemerintah, Penyalahgunaan kekuasaan salah satu penyebab dari pada penyalahgunaan bantuan. artinya, pemerintah atau pejabat tertentu menggunakan bantuan untuk keuntungan politik atau pribadi.
- b. Faktor penyebab masyarakat mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah, Tidak semua masyarakat di Kecamatan Alasa melaksanakan kebijakan publik, ada beberapa hal penyebabnya: Kurangnya sosialisasi dari kebijakan yang diberikan pemerintahan sehingga sulit untuk dilaksanakan.

## **2. Kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa**

Kebijakan Publik memberikan dampak positif yang sangat dirasakan pada peningkatan kesejahteraan sosial, dan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Kebijakan publik bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.(*kecamatan alasa*).

Kendala yang dihadapi pada Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu:

- a. Kurangnya data dan informasi yang lengkap tentang kondisi kemiskinan, sehingga sulit untuk merancang dan menerapkan program yang efektif dan tepat sasaran
- b. Anggaran yang tidak memadai sehingga dapat menghambat



pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

- c. Masih ada warga yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah.
- d. Keterbatasan infrastruktur dan layanan di daerah terpencil atau kurang berkembang dapat menyulitkan distribusi bantuan dan pelaksanaan program.

### **3. Upaya Mengatasi Kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa**

Secara yuridis formal, Kebijakan Publik dijalankan sebagai pelaksanaan dari beberapa peraturan undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui Kebijakan Publik diharapkan mampu mempertahankan kehidupannya (life survival) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, Kebijakan Publik sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas. Kebijakan Publik menjadi model perencanaan yang unik dengan

mempertahankan kehidupan (life survival) dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, Kebijakan Publik bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui program yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu yaitu Camat dan pemerintahan Kecamatan bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hambatan, Serta memperbaiki koordinasi antar lembaga dan instansi dengan membentuk forum atau tim koordinasi khusus yang melibatkan semua pihak terkait. Kebijakan Publik sangat berdampak baik dan berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu ekonomi keluarga baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial serta dapat menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Alasa.





#### IV. KESIMPULAN

1. Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa belum 100% terlaksana. Hal ini terjadi karena masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan. Dan juga sebagian masyarakat Kecamatan Alasa mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa dalam hal penanggulangan kemiskinan.
2. Kendala yang dihadapi pada Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu : keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada di kecamatan alasa sehingga dapat menyulitkan dan menghambat pelaksanaan program, daerah yang dijangkau oleh masyarakat memiliki akses terbatas ke sumber daya atau bantuan yang disediakan oleh program pemerintah, terutama jika infrastruktur atau logistik belum memadai, keterbatasan infrastruktur atau akses yang buruk ke lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan sehingga dapat menyulitkan distribusi program. Hal ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kecamatan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Kebijakan Publik Dalam Program

Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu, Camat dan pemerintahan Kecamatan bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hambatan, selalu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif. Hal ini merupakan supaya meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. 2021. *Formulasi kebijakan publik. Studi relokasi pasar*. (2021 1st ed). Purwokerto. CV. Pena persada.
- Ali Khomsan dkk (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service (CAPS)



- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (2017). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Dunn, William N, (2018). *Analisis kebijakan publik*. Edisi keenam. New York.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding public policy (15th Ed.)*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Herdiana,D.(2018). *Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar*. Jurna Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rukminingsih Adnan, and Latief. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Erhaka Utama.
- Rachman. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahmadi. (2011:71). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Sidiq & Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *In Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Suryawati 2015. Laporan Evaluasi Implementasi Kebijakan Obat Nasional Indonesia Tahun 2014. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi* Vol.7 No.2.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung.
- Tjiptoherijanto, (2017). *Paradigma Administrasi Publik Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Winarno,Budi.2020. *Teori dan proses kebijakan publik*. Media press indo Yogyakarta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2017.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (J. Yursa (ed.); I). Bandar Publishing.